



**PUTUSAN**

Nomor : 40/G/2021/PTUN.BKL

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**RAHMA HIDAYANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Perangkat

Desa/Sekretaris Desa, tempat tinggal Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu, email: rahmahidayanah@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ERWIN SAGITARIUS, S.H.,M.H.**

2. **TARMIZI, S.H.**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada **Law Office Erwin Sagitarius Associates**, beralamat di Jalan Hibrida 9.A Nomor 59, RT.23 / RW.008, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, email; [erwinsagitariusadvokat@gmail.com](mailto:erwinsagitariusadvokat@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 25 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Melawan**

**KEPALA DESA GURU AGUNG I**, Berkedudukan di Desa Guru Agung I, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. **DASRUL IMRAN, S.H.**, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur;

*Hal. 1 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JUPRIZAL NURABADI, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Sub. Bantuan Hukum, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur;

3. **MEXHAIZER, S.H.**, jabatan Kepala Sub Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jalan Kol. Syamsul Bahrin, Padang Kempas Bintuhan, domisili elektronik (E-mail):

bagian.hukumsetdakabkaur@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/GA.1/KU/KK/2021 Tanggal 13 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 40/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tanggal 22 Juli 2021 tentang lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 40/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 40/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 24 Desember 2021 tentang Penunjukkan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 40/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN-PP/2021/PTUN.BKL tanggal 23 Juli 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN-HS/2021/PTUN.BKL tanggal 2 September 2021 tentang Hari Sidang;
7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa serta mendengarkan keterangan saksi dalam perkara ini ;

Hal. 2 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 19 Juli 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2021 dengan Register Perkara Nomor : 40/G/2021/PTUN.BKL;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021;**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 2 September 2021, dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 16 September 2021, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

**Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara ini adalah :**

Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan.

II.

**Kewenangan Mengadili :**

Hal. 4 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara, memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 5/1986 "*Tata usah Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah*" dan Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 5/2009 bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara (objek Sengketa) Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya pengertian sengketa usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 didefinisikan sebagai berikut " Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* maka berdasarkan ketentuan tersebut pihak yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 51 /2009, maka dalam perkara aquo jelas Tergugat merupakan adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan

Hal. 5 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh

orang badan hukum perdata;

Selanjutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diperluas mencakup ;

a. Penetapan tertulis yang juga mencangkup perbuatan factual

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan

penyelenggaraan Negara lainnya

c. Berdasarkan ketentuan Perundang undangan dan AAUPB

d. Bersifat final dalam arti lebih luas

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara pada perbuatan hukum public,

harus berdasarkan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas legalitas dalam

hukum administrasi Negara. Maka dengan demikian, Obyek sengketa yang di

periksa PTUN adalah yang berkaitan dengan penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan

hukum Tata Usaha Negara. Maka Pada Perkara aquo, Keputusan Kepala Desa

Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYA

sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, Yang diterbitkan oleh Tergugat

sudah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang sudah bersifat ;

□ Bersifat kongkrit, dimana Keputusan Tata Usaha Negara nya tidak abstrak, sudah

ada keputusannya (berwujud) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa selaku

Pejabat tata usaha Negara telah mengeluarkan Keputusan TUN yang

tertulis tidak secara lisan;

□ Bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, dalam hal ini kepala Desa

selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Keputusan Tata

usaha Negara Mengangkat Perangkat Desa yang baru dengan

memberhentikan Perangkat Desa Desa yang lama sehingga Keputusan

Tata Usaha Negara Tersebut sudah bersifat individual;

Hal. 6 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat final dimana Keputusan tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang definitive dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Desa yang telah dilantik oleh Bupati pada tanggal 5 April 2021, dan dalam Keputusan Kepala Desa tersebut telah menimbulkan akibat hukum terhadap Perangkat Desa yang lama sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Maka berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap Sengketa Tata

Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat berupa Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, jelas merupakan Kewenangan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara;

### III. **Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.**

Bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang, dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

1. Bahwa Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, diketahui Penggugat pada tanggal 23 April 2021, dimana Tergugat sengaja menerbitkan surat keputusan tersebut dengan tujuan untuk menggantikan Pengangkatan Perangkat Desa yang masih aktif (Penggugat) dengan Perangkat Desa yang baru;

Hal. 7 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 75 ayat (2) huruf a, maka pada tanggal 28 April 2021 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat atas dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi Keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan atau tidak memberikan jawaban atas Keberatan Penggugat tersebut;
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 75 ayat (2) huruf b, maka Penggugat pada Tanggal 17 Juni 2021 Penggugat telah mengajukan Banding ke BUPATI Kabupaten KAUR melalui surat melalui surat Nomor : 01/LOES-A/VI/2021 Dan selanjutnya atas Permohonan Banding tersebut telah dijawab oleh Termohon Banding melalui surat 180/620/B.II/KK/2021 tertanggal 8-7-2021;
5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 78 ayat (4) *\*badan dan / Pejabat Pemerintah menyelesaikan Banding paling lama 10 Hari kerja\** dalam hal ini Penggugat Menerima Jawaban atas Permohonan Banding yang diajukan Penggugat diterima pada tanggal 8 Juli 2021;
6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menerangkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya, maka Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat masih dalam Tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 8 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang masih memiliki tengang waktu sembilan puluh hari, yang dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 5 tahun 1986; pasal 3 ayat 3 (2) "tengang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan" dan pada pasal 3 ayat (3) tengang waktu Sembilan puluh hari, dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Maka dalam hal ini gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan tersebut diatas, dan selanjutnya berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, disebutkan bahwa *\*Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan di hitung 90 hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani Penyelesaian Upaya Administrasi\** maka berdasarkan tanggal diketahuinya / diterimanya Keputusan PTUN tersebut, dalam hal ini Penggugat Mengetahui adanya Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekertaris Desa, tanggal 20 April 2021, berdasarkan diterimanya Surat Keputusan atas Upaya Administratif tersebut, maka tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalam ketentuan hukumnya;

#### IV. Kepentingan Penggugat Yang dirugikan :

Hal. 9 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, oleh Tergugat secara mutatis dan mutandis kedudukan Penggugat telah diberhentikan akibat dari Keputusan Kepala Desa tersebut, sehingga Penggugat merasa dirugikan akibat keputusan kepala desa tersebut, yaitu Penggugat kehilangan Hak Hak nya sebagai Perangkat Desa ; tidak menerima gaji, dan berpengaruh kepada mata pencarian Penggugat dan tidak dapat lagi menjalankan Kewajibannya sebagai Perangkat Desa, maka dengan demikian jelas Penggugat merupakan sebagai pihak yang dirugikan akibat dari dikeluarkannya Keputusan tersebut. sesuai dengan alat bukti / objek sengketa;

**V. Posita Gugatan**

Alasan alasan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini adalah

sebagai berikut ;

1. Bahwa Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa pada Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, nama Penggugat berdasarkan pada KTP tertulis Rahma Hidayana adalah orang yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, mengakibatkan Penggugat secara mutatis mutandis telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa;
4. Bahwa selanjutnya dengan telah diajukannya upaya administrasi oleh Penggugat tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004; maka surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sudah termasuk dalam Objek Gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit individual dan final, dimana Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat sudah bersifat Kongkrit, dibuat secara tertulis, berwujud / tidak abstrak, dan sudah bersifat individual ditujukan langsung kepada Perangkat Desa dengan mengangkat dan atau memberhentikan Perangkat Desa yang lama dan bukan merupakan Keputusan yang bersifat umum, sudah bersifat final dimana Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Kepala Desa selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang definitive, dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Desa yang telah dilantik oleh Bupati pada tanggal 5 April 2021, dan dalam Keputusan Kepala Desa tersebut telah menimbulkan akibat hukum terhadap Perangkat Desa yang lama, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;

Hal. 11 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, yang dikeluarkan oleh Tergugat semata mata didasarkan atas kepentingan politik Tergugat, dimana Tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan kepala desa melakukan janji politiknya kepada pendukungnya, mengganti Perangkat desa yang lama dan masih aktif, dalam hal ini Kepala Desa yang baru dilantik seyogjanya harus memperhatikan Peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai pengangkatan dan pemberhentian Prangkat desa, dan karena Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan secara inprosedural dan tidak memperhatikan mekanisme yang berlaku maka, Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan yang cacat hukum, karena dikelurakan secara inprosedural dan bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik, dan diterbitkan dengan tidak mengindahkan Peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan atau dengan Mengesampingkan Peraturan perundang undangan yang berlaku yang mengatur tentang Perangkat Desa, yaitu; Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaannya, dan diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015, dan Pada paragraf 3 pasal 68 dan pasal 69 mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya pada pasal 70 mengatur hal hal yang berkenaan dengan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Hal. 12 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Nomor 83 Tahun 2015, pada Pasal 5 ayat (3) huruf b dan pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b serta huruf d Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa;

6. Bahwa Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, yang diterbitkan Tergugat melanggar Peraturan

Perundang undangan yang berlaku terhadap Perangkat Desa, yaitu ;

- a) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaannya, dan diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015, dan Pada paragraf 3 pasal 68 dan pasal 69 mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya pada pasal 70 mengatur hal hal yang berkenaan dengan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri; pada perkara aquo berkenaan dengan penerapan hukumnya, Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan hukum dan atau persyaratan hukum yang menempatkan Penggugat pada terpenuhinya ketentuan hukum tersebut, sehingga mengakibatkan Keputusan TUN menjadi cacat

hukum, seperti;

- o Pada Pasal 68 yaitu; ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena; a). Meninggal dunia, b). Permintaan sendiri atau, c). Diberhentikan, ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ; a). Usia telah genap 60 tahun, b). Berhalangan Tetap, c). Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- o Pada Pasal 69 yaitu; Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut; a). Kepala Desa melakukan

Hal. 13 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konsultasi dengan camat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa, b). Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan, c). Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa
- o Pada Pasal 70, yaitu; Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.
  - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; terhadap peraturan tersebut pada perkara aquo, Keputusan TUN yang dibuat oleh Tergugat, dalam penerapan hukumnya, tidak didasarkan pada alasan hukum dan atau persyaratan hukum untuk dapat diperhentikannya Penggugat, dari kedudukannya sebagai Perangkat Desa, seperti ;
    - o Pada Pasal 5 ayat (3) huruf b di ubah, menjadi ;
      - (1). Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat
      - (2). Perangkat Desa berhenti karena; a). meninggal dunia, b). permintaan sendiri dan c). diberhentikan.
      - (3). Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena; a).Usia telah genap 60 tahun, b). Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, c).Berhalangan tetap, d).Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, e).Melanggar larangan sebagai perangkat desa (sebagaimana dimaksud pada pasal 51 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Hal. 14 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(4). Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan Kepada Camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan

(5). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(6). Rekomendasi tertulis Camat, didasarkan pada Persyaratan pemberhentian Perangkat Desa

o Pada pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b serta huruf d di ubah, menjadi ;

(1) Perangkat Desa diberhentikan Sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) karena; a). Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhdap keamanan negara. b). Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun berdasarkan register perkara pengadilan. c). Tertangkap tangan dan ditahan. d). Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.

(3) Perangkat Desa di berhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut diatas, Penggugat tidak dalam kapasitas terpenuhinya unsur pasal Pasal 5 ayat (3) huruf b dan pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b serta huruf d, maka dengan tidak terpenuhinya unsur daripada ketentuan tersebut jelas

*Hal. 15 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan

Keputusan yang cacat hukum, dan harus dibatalkan demi hukum.

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan

Dan Pemberhentian Perangkat Desa; terhadap peraturan tersebut

pada perkara aquo, Keputusan TUN yang dibuat oleh Tergugat,

dalam penerapan hukumnya, tidak mengikuti mekanisme yang

termuat pada ketentuan hukumnya dan tidak didasarkan pada

alasan hukum serta persyaratan hukum untuk dapat

diperhentikannya Penggugat, dari kedudukannya sebagai

Perangkat Desa, seperti ;

o Pasal 5 mengatur tentang pemberhentian yaitu;

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah

berkonsultasi dengan camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena; a). Meninggal dunia, b).

Permintaan sendiri dan c). Diberhentikan

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c), Karena; a). Usia telah genap 60 Tahun, b).

Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

c). Berhalangan Tetap, d). Tidak lagi memenuhi persyaratan

sebagai Perangkat Desa dan e). Melanggar larangan

sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a), dan huruf b), ditetapkan dengan

keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat

paling lambat 14 hari.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu

kepada camat.

Hal. 16 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat  
(4) didasarkan pada Persyaratan pemberhentian Perangkat

Desa;

o Pasal 6 mengatur tentang pemberhentian sementara, yaitu;

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa

setelah berkonsultasi dengan Camat;

- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) karena; a). Ditetapkan sebagai

tersangka dan ditahan, b). Ditetapkan sebagai Terdakwa, c).

Tertangkap tangan dan ditahan, d). Melanggar larangan

sebagai Perangkat desa yang diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan;

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a huruf b dan huruf c diputus

bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah

berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada

jabatan semula.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut diatas, Penggugat tidak dalam

kapasitas terpenuhinya unsur pasal Pasal 5 mengatur Tentang

Pemberhentian yang termuat pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat

(4), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 6 mengatur tentang pemberhentian

sementara, maka dengan tidak terpenuhinya unsur daripada

ketentuan tersebut jelas Keputusan TUN yang diterbitkan oleh

Tergugat, merupakan Keputusan yang cacat hukum, dan harus

dibatalkan demi hukum.

Hal. 17 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seharusnya Tergugat dalam Mengeluarkan Keputusan TUN dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang mengatur tentang itu, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu untuk dapat mengangkat dan atau memberhentikan Perangkat Desa, Tergugat harus mengkonsultasikan kepada Camat, atas nama Bupati/ Walikota, dengan memperhatikan ketentuan yang memuat Persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, yaitu ; Pemberhentian Perangkat Desa melampirkan alasan untuk memberhentikan Perangkat Desa yaitu ; a). Usia telah genap 60 tahun, b). Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, c). Berhalangan tetap, d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, e). Melanggar larangan sebagai perangkat desa (sebagaimana dimaksud pada pasal 51 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014), selanjutnya dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut, untuk dapat dilakukan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru dapat dilakukan jika telah terjadi kekosongan, dan tidak berjalannya salah satu fungsi dari Perangkat Desa tersebut sekurang kurangnya dua bulan, maka kepala Desa baru dapat mengusulkan kepada Camat untuk dilakukan pengangkatan Perangkat Desa yang baru, dan ada rekomendasi dari Camat, sebagaimana dimaksud pada Ketentuan pasal 7 diubah dan ditambah dua ayat baru yakni ayat (4) dan ayat ((5), sehingga berbunyi sebagai berikut;

Hal. 18 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang tersedia.
  - (2). Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat paling lambat 7 hari terhitung sejak penugasan.
  - (3). Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong paling lambat 2 bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
  - (4). Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan Cara; Mutasi jabatan antar Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa dan Penyaringan calon Perangkat Desa.
  - (5). Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dokonsultasikan dengan Camat.
8. Bahwa terhadap Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak didasarkan pada Ketentuan hukum yang berlaku yaitu; Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaannya, dan diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015, Pada paragraf 3 pasal 68 dan pasal 69 mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya pada pasal 70 mengatur hal hal yang berkenaan dengan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Tentang

Hal. 19 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b serta huruf d, dan juga pada Tergugat dalam Keputusan TUN yang diterbitkannya, dengan tidak melampirkan alasan untuk memberhentikan Penggugat dari kedudukannya sebagai Perangkat

Desa, sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut diatas yaitu;

d) Tidak didasarkan pada konsultasi camat mengenai Pemberhentian Perangkat

Desa, dan tidak ada rekomendasi tertulis dari Camat yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, c).

Rekomendasi tertulis dari Camat.

e) Tidak didasarkan pada alasan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

ketentuan hukumnya yaitu , Meninggal dunia, Berhalangan Tetap, Usia telah genap 60 tahun, Permintaan sendiri atau, Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, Tertangkap tangan dan ditahan, Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara, Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka sebagaimana uraian tersebut diatas Keputusan

Pengangkatan dan atau Pemberhentian Perangkat Desa tersebut, jelas merupakan suatu Keputusan yang inprosedural, yang tidak memuat Persyaratan dan atau alasan hukum pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa, maka Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai

Hal. 20 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, yang diterbitkan oleh

Tergugat harus dinyatakan cacat hukum.

9. Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang

Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran

Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa,

tanggal 20 April 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas

umum pemerintahan yang baik;

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara

aquo, tidak dilandaskan pada kepatuhan dari Tergugat atas

ketentuan hukum pada ; Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan pelaksanaannya, dan diubah dengan

peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015, Pada paragraf 3

pasal 68 dan pasal 69 mengatur tentang Pemberhentian

Perangkat Desa, selanjutnya pada pasal 70 mengatur hal hal yang

berkenaan dengan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat

Desa diatur dalam Peraturan Menteri, serta Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Ketentuan pasal 6 ayat (2)

huruf a dan huruf b serta huruf d, sehingga keputusan yang

diterbitkan Tergugat keluar dari keajengan yang seharusnya

berlaku, dan mengakibatkan ketidak adilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan sehingga Keputusan yang

diterbitkan oleh Tergugat melanggar Asas kepastian hukum;

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara a

quo, tidak dilandaskan pada Asas Kemanfaatan dimana

Hal. 21 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat pada perkara aquo tidak didasarkan pada pemanfaatan secara seimbang antara : (1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) Kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita, akan tetapi yang dikeluarkan oleh Tergugat semata mata didasarkan atas kepentingan politik Tergugat, dimana Tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan Tergugat / kepala desa melakukan janji politiknya kepada pendukungnya, mengganti Perangkat desa yang lama dan masih aktif;

- o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada Asas ketidak berpihakkan dimana Tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan kepala desa, Tergugat melakukan janji politiknya kepada pendukungnya, mengganti Perangkat desa yang lama dan masih aktif, sehingga Keputusan TUN yang dibuat oleh Tergugat semata mata didasarkan atas kepentingan politik Tergugat (diskriminatif);
- o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk

Hal. 22 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan, dalam Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Terugat dengan mengesampingkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, tanpa didasarkan pada persetujuan dan atau rekomendasi dari camat dengan memuat alasan alasan hukum pengangkatan dan atau pemberhentian perangkat desanya;

- o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukan kewenangan, akan tetapi dalam Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan yang dibuat didasarkan pada kepentingan pribadi Tergugat dalam memenuhi janji Politiknya untuk kepentingan pendukungnya, dengan cara, menggantikan Penggugat, dengan Pendukungnya untuk menggantikan Jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa , maka dalam hal ini Kepala Desa yang baru dilantik seyogjanya harus memperhatikan Peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa, dan karena Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa

Hal. 23 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan secara inprosedural dan tidak memperhatikan mekanisme yang berlaku maka, Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan yang cacat hukum karena dikelurakan secara inprosedural dan bertentangan dengan hukum dengan tidak mengindahkan Peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan atau dengan Mengesampingkan Peraturan perundang undangan yang berlaku

yang mengatur tentang Perangkat Desa;

- o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, dimana alasan Pengangkatan dan Pemberhentian tidak benar dan jujur serta bersifat diskriminatif dengan tidak melalui prosedur dengan memberikan alasan hukum pemberhentian dan atau pengangkatan yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dimana pada alasan Pemberhentian Penggugat tidak didasarkan pada teguran atas kesalahannya sebelumnya dan memuat alasan hukum yang dilanggar Penggugat dan atas hal tersebut tidak pernah ada Pembahasan atas Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan atau menjadi dasar hukum untuk dilakukannya usulan seleksi Pengangkatan Perangkat Desa yang baru;

- o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak

Hal. 24 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diskriminatif, akan tetapi dalam Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan yang dibuat didasarkan pada kepentingan pribadi Tergugat dalam memenuhi janji Politikanya, sehingga mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian yang seharusnya berlaku dikesampingkan oleh Tergugat, maka dengan demikian Keputusan TUN di terbitkan Tergugat jelas merupakan Keputusan TUN yang diterbitkan untuk kepentingan pribadinya dan bukan atas dasar pada Kepentingan umum;

10. Bahwa dengan telah dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor :

03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, oleh Tergugat, telah menimbulkan akibat hukum Terhadap Penggugat, yaitu dengan tidak diterimannya lagi Hak Hak Penggugat sebagai Perangkat Desa, sehingga Kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan Kewajibannya sebagai Perangkat Desa dan kehilangan Hak Hak nya sebagai Perangkat Desa seperti: tidak menerima gaji, tidak diberi hak untuk melakukan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;

11. Bahwa dengan dengan dikeluarkannya surat Keputusan tersebut oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat Menpergunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan (detournement de pouvoir);

12. Bahwa Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa,

Hal. 25 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2021, yang menjadi objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur; dalam pasal 53 ayat (2a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sehingga Keputusan tersebut mengandung Cacat Hukum dan harusla dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum;

## VI. PERMOHONAN DALAM PENUNDAAN

Sebagaimana ketentuan pasal 67 Undang Undang Peradilan Tata

Usaha Negara bahwa Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, Telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi dapat menjalankan Kewajibannya sebagai Perangkat Desa dan kehilangan Hak Hak nya sebagai Perangkat Desa seperti; tidak menerima gaji, tidak diberi hak untuk melakukan kewajibannya sebagai Perangkat Desa. Sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, karena Tergugat Mempergunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan (detournement de pouvoir), maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap status hukum Penggugat, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021;

## VII. PETITUM

Hal. 26 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, bersama ini Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini memberi Putusan dengan Amar Putusan Sebagai Berikut;

## DALAM PENUNDAAN KEPUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat atas Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021 sebelum adanya keputusan hukum dalam Perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021;
3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021, Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021;
4. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk Mengembalikan kedudukan Penggugat sebagaimana semula sebagai Perangkat Desa dalam jabatannya sebagai Sekretaris Desa Guru Agung I atau pada jabatan yang setara;

Hal. 27 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal September 2021 melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 30 September 2021, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 lampiran nomor urut 1 atas nama Rahma Hidayana, sebagai Sekretaris Desa Tanggal 20 April 2021.
3. Upaya Administrasi
  - a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administrasi terdiri atas Keberatan dan Banding.
  - b. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat menyatakan telah menempuh upaya Administrasi berupa keberatan Kepada Penguat pada tanggal 28 April 2021 atas dikeluarkannya objek sengketa. Bahwa Tergugat belum pernah menerima Keberatan Administrasi secara tertulis yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 28 April 2021, oleh karenanya dalam sengketa ini Penggugat belum pernah menempuh upaya administrasi berupa keberatan administratif kepada tergugat.

Hal. 28 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Banding ke Bupati Kaur pada tanggal 17 Juni 2021 melalui surat Nomor 01/LOES-A/VI/2021 dan telah dijawab oleh Termohon Banding melalui Surat Nomor 180/620/B.II/KK/2021 tertanggal 8 Juli 2021. Bahwa didalam permohonan Banding Administrasi yang diajukan kuasa hukum Penggugat tertanggal 12 Juni 2021 didalam Perihalnya dituliskan Permohonan Banding, namun didalam Poin III memuat tentang alasan Keberatan, bukan alasan Banding Administrasi, Point IV Pertimbangan Yuridis menjelaskan tentang Upaya Administrasi Keberatan, hal tersebut tidak sejalan dengan perihal surat yaitu Permohonan Banding. Bahwa jika yang diajukan adalah Keberatan Administrasi maka keberatan tersebut arusnya ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan, dalam sengketa ini adalah Kepala Desa bukan Bupati Kaur sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa Permohonan Banding Administrasi oleh Penggugat tersebut tidak termasuk upaya administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- d. Bahwa penggugat tidak melakukan Upaya Administrasi berupa keberatan dan banding administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi menyatakan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan

Hal. 29 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”

- f. Bahwa karena di dalam sengketa ini Penggugat tidak melakukan upaya administratif dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut ketentuan undang-undang, maka dapat dipandang bahwa Penggugat sesungguhnya telah menerima atau tidak keberataan atas dikeluarkannya objek sengketa.

- g. Bahwa oleh karena Penggugat di dalam sengketa ini tidak menempuh upaya Administrasi, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa a quo, sehingga beralasan hukum jika majelis hakim menyatakan gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima.

#### 4. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel).

- a. Bahwa Penggugat dalam point IV Kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak tegas menjelaskan tentang Dasar Hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang kepentingan hukumnya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa. Penggugat didalam dalilnya tidak dapat menjelaskan dasar keputusan kepala Desa yang dicabut yang mempunyai hubungan hukum dengan keluarnya objek sengketa yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang mempunyai Hak Hukum untuk melakukan gugatan dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo. Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara kepentingan hukum tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa.

- b. Dalil-Dalil yang dimuat dalam Posita Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur. Alasan-alasan hukum yang dimuat dalam Posita Gugatan tidak jelas mengurai dasar-dasar hukum yang dilanggar oleh tergugat dalam penerbitan objek sengketa baik dari aspek kewenangan, aspek prosedural maupun aspek substansi. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Hal. 30 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



- tergugat tidak jelas menunjukkan ketentuan Perundang-Undangan yang dilanggar oleh tergugat, sehingga dasar hukum gugatan tidak jelas.
- c. Alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan yang dikemukakan didalam Posita Point 5 dan Point 9 bukanlah alasan hukum. Dalam Dalilnya Penggugat secara umum menyatakan bahwa Objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan pada kepentingan politik tergugat, dimana tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan Kepala Desa melakukan janji politiknya kepada pendukungnya, mengganti Perangkat Desa yang lama dan masa aktif. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut bukanlah alasan yang menjelaskan tentang pertentangan antara objek sengketa dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa :  
"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :  
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."
- e. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan didalam uraian posita Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak secara rinci menjelaskan tentang aspek yang pertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Posita gugatan Penggugat harusnya memuat secara rinci aspek yang dilanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Didalam dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak jelas menerangkan tentang aspek

Hal. 31 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, baik

dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi.

- f. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat.
3. Bahwa sebelum tergugat menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat, terlebih dahulu tergugat uraikan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa Guru Agung I dalam pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 20 Februari 2021, dan dilantik pada Tanggal 5 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-390 Tahun 2021 tentang pemberhentian Pejabat Kepala desa dan pengangkatan kepala Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara, dan pada tanggal 9 April 2021 dilakukan serah terima jabatan dari Penjabat Kepala Desa ke Kepala Desa definitif.
  - b. Bahwa dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa melakukan inventaris masalah dan menyusun rencana kerja. Dari hasil inventarisir masalah Kepala Desa menemukan bahwa pengangkatan perangkat desa di desa Guru Agung I pada periode sebelumnya belum sesuai dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - c. Bahwa Proses Pengangkatan Penggugat selaku Perangkat Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa belum mempedomani Peraturan Menteri

Hal. 32 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.
- d. Bahwa kepala desa dalam kebijakannya berupaya untuk melakukan penertiban terkait dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat desa, maka pada tanggal 08 April 2021 Tergugat langsung berkonsultasi dengan Camat Kaur Utara dan menyampaikan Pemohon rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa secara tertulis melalui surat nomor 140/01/SK/GR.I /KK/2021 tanggal 8 April 2021.
- f. Bahwa Camat Kecamatan Kaur Utara telah memberikan Rekomendasi Pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa, sesuai dengan surat rekomendasi Plt. Camat Kecamatan Kaur Utara Nomor 140/43/C.2/KU/KK/2021 Tanggal 12 April 2021.
- g. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut, maka pada tanggal 20 April 2021 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021. Lampiran Nomor 1 atas nama Rahma Hidayana sebagai Sekretaris Desa.
- h. Bahwa dalam rangka untuk melakukan Pengangkatan Perangkat Desa Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka Kepala Desa Guru Agung I melakukan proses pengangkatan Perangkat Desa Baru dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Pada Tanggal 20 April 2021 dengan dihadiri tokoh masyarakat, BPD, tokoh adat, staf kecamatan dan perwakilan masyarakat dilaksanakanlah

Hal. 33 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah pembentukan tim seleksi penjurangan dan penyaringan perangkat desa Guru Agung I sebagaimana dimuat dalam berita acara rapat musnyawarah Pembentukan Tim Seleksi tanggal 20 April 2021 dan surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penunjukan Anggota Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara.

2. Tim Seleksi melaksanakan penjurangan dan penyaringan perangkat desa baru,

Dengan tahapan dan jadwal sebagai berikut :

- a. Tahap Pendaftaran tanggal 21 April 2021 s/d 23 April 2021
- b. Seleksi dan Penetapan Calon yang Berhak mengikuti Seleksi atau Tes April 2021.
- c. Tes seleksi Calon Perangkat Desa dan Penetapan Perangkat Desa Terpilih

Tanggal 26 April 2021

3. Berdasarkan hasil seleksi tim penjurangan dan penyaringan perangkat desa, maka kepala desa menyampaikan surat kepada Camat Kaur Utara Nomor 140/02/SK/GR.I/KU/KK/2021 tentang Permohonan Rekomendasi

Pengangkatan Perangkat Desa.

4. Pada tanggal 27 April 2021 Camat Kaur Utara mengeluarkan rekomendasi

Pengangkatan Perangkat Desa baru melalui Surat Rekomendasi

Nomor : 140/51/C.2/KU/KK/2021.

5. Pada tanggal 28 April Kepala Desa GURU AGUNG I berdasarkan rekomendasi dari camat Kecamatan Kaur Utara Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tahun

2021 atas nama Kusmiran Hadijoyo, SE..

4. Bahwa perlu tergugat tegaskan bahwa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kewenangan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : "dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa." Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 ayat

Hal. 34 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) diatur bahwa "Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus."  
Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengangkatan dan pemberhentian

perangkat desa adalah kewenangan kepala desa.

5. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada Point 5 Posita Gugatan yang pada intinya menyebutkan bahwa dikeluarkannya objek sengketa oleh tergugat semata mata didasarkan atas kepentingan politik tergugat, dimana tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan Kepala Desa melakukan janji politiknya kepada pendukungnya mengganti perangkat desa yang lama dan masih aktif". Bahwa dalil yang disampaikan penggugat tersebut bukan merupakan alasan hukum, melainkan hanya asumsi yang dibangun oleh penggugat tanpa dapat dibuktikan, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan. Terhadap dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang cacat hukum karena dikeluarkan secara inprosedural dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar. Penggugat dalam dalilnya tidak mampu menunjukkan aspek mana yang dilanggar oleh tergugat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan objek sengketa, baik dari sisi prosedural dalam penerbitan objek sengketa maupun substansi hukum dalam penerbitan objek sengketa.

6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada huruf 7 posita gugatan yang pada prinsip menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan cacat hukum, dan harus dibatalkan demi hukum karena bertentangan atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tergugatanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa uraian yang disampaikan oleh penggugat dalam posita poin 6 tersebut tidak jelas menerangkan bagian proses yang dilalui oleh tergugat yang dapat dinyatakan pertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Hal. 35 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail aspek yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, baik dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi

- b. Bahwa dari aspek kewenangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa Berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- c. Bahwa dari aspek Prosedural dalam penerbitan objek sengketa juga telah dilaksanakan dan dilewati oleh Tergugat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah tergugat uraikan dalam Poin 3 Huruf e dan f jawaban gugatan diatas.
- d. Bahwa dari aspek Substansi hukum dapat tergugat jelaskan bahwa, penggugat diberhentikan sebagai Perangkat desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.

Bahwa dalam pengangkatannya sebagai Perangkat Desa, Penggugat diangkat oleh Kepala Desa sebelumnya tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 106 dan pasal 107 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa. Pengangkatan penggugat oleh Penjabat Kepala Desa sebelumnya tidak melewati mekanisme Penyaringan dan Penjaringan atau seleksi oleh Tim. Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa oleh penjabat kepala desa juga tidak melewati tahapan Konsultasi ke camat.

Bahwa oleh karena proses pengangkatan pengkuat sebagai perangkat desa tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016,

*Hal. 36 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka pemberhentian penggugat sebagai Perangkat Desa adalah sah dan bedasar hukum.

7. Bahwa dalam melakukan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat desa, Penggugat telah melewati mekanisme dan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Camat Kecamatan Kaur Utara sesuai surat Rekomendasi Nomor 140/43/C.2/KU/KK/2021 Tanggal 12 April 2021 untuk Pemberhentian perangkat Desa, dan Surat Rekomendasi Nomor 140/51/C.2/KU/KK/2021 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

8. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam point 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena objek sengketa dikeluarkan oleh tergugat didasarkan pada kepentingan pribadi Tergugat dalam memenuhi janji politiknya untuk kepentingan pendukungnya dengan cara menggantikan Penggugat dengan pendukungnya untuk menggantikan jabatan penggugat sebagai perangkat desa bukan merupakan alasan hukum. Dalil yang disampaikan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, dalil tersebut hanya asumsi yang dibangun oleh pengguat tanpa dapat dibuktikan, sehingga beralasan hukum alasan tersebut untuk ditolak.

9. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan uraian pertimbangan baik dari aspek prosedural maupun substansi, sehingga objek sengketa *a quo* telah selaras atau sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam

*Hal. 37 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- c. Asas Kepentingan umum; dan
- d. Asas keterbukaan.

## II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Terhadap Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat, dapat  
tergugatanggapi sebagai Berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara telah tegas mengatur tentang Penundaan. Pasal 67 ayat (1)  
Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan  
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat  
Tata Usaha Negara yang digugat.
2. Permohonan Penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang  
sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat  
dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap  
dilaksanakan, Permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila  
kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan  
dilaksanakannya keputusan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan  
Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan diatur bahwa : “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat  
ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian  
negara, kerusakan lingkungan hidup; dan/atau konflik sosial”.

Hal. 38 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari uraian tersebut jelas bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar dikabulkannya permohonan penundaan dari pemohon.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM PENUNDAAN**

Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan dari Penggugat.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor : 03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 lampiran nomor urut 1 atas nama Rahma Hidayana, sebagai Sekretaris Desa Tanggal 20 April 2021 adalah sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.  
Atau Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Oktober 2021 yang diserahkan pada persidangan secara elektronik (e-Court) pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 12 Oktober 2021 yang diserahkan pada Persidangan secara Elektronik (e-Court) pada tanggal 14 Oktober 2021;

Hal. 39 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 20 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Tanggal 26 April 2021 Hal Sanggahan/Keberatan Atas Pemberhentian, beserta lampiran (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat dari Rahma Hidayana, dkk yang ditujukan kepada Plt. Camat Kaur Utara tanggal 3 Mei 2021 perihal Banding Administrasi (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kaur Nomor: 01/LOES-A/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 Perihal Permohonan Banding (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Bupati Kaur yang ditujukan kepada Erwin Sagitarius, S.H. M.H. (Kuasa Hukum Rahma Hidayana) Nomor: 180/620/B.II/KK/2021 tanggal 8 Juli 2021 Perihal Jawaban Permohonan Banding Administrasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahma Hidayana NIK. 1704034804870001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.268 Tahun 2021 tentang Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur tanggal 29 Januari 2021 (Fotokopi sesuai Hal. 40 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 141-03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2018 tanggal 07 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi: Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2004/2005, atas nama Rahma Hidayanah tanggal 3 September 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Kaur Utara (Fotokopi sesuai dengan salinan);
12. Bukti P-12 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia Nomor: 141/4286/SJ

Hal. 41 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2020 Hal Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P-15 : Surat dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia Nomor: 140/1682/SJ tanggal 2 Maret 2020 Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P-16 : Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P-17 : Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Kaur Nomor : 800/296/DPMD/KK/2021 tanggal 11 Mei 2021 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.390 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara tanggal 28 April 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Desa Guru Agung I yang ditujukan kepada Camat Kaur Utara Nomor: 140/01/SK/GR.I/KK/2021 tanggal 08 April 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Rekomendasi Plt. Camat Kaur Utara Nomor: 140/43/C.2/KU/KK/2021 tanggal 12 April 2021 (Fotokopi Hal. 42 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 20 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa, Hari Selasa tanggal 20 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penunjukan Anggota Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Tahun 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Guru Agung I Tahun 2021 Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 26 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Desa Guru Agung I yang ditujukan kepada Camat Kaur Utara Nomor: 140/02/SK/GR.I/KU/KK/2021 tanggal 26 April 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Rekomendasi Plt. Camat Kaur Utara Nomor: 140/51/C.2/KU/KK/2021 tanggal 27 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Keterangan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 03/GR 1/KU/KK/2021 tanggal 1 April 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016  
Hal. 43 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T-13 : Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tata

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

tanggal 27 Juli 2021 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut,

Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan perkara ini, yang bernama:

**RITASMAN** sebagai saksi Penggugat, tempat tanggal lahir, Guru Agung, 28 September 1979, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Desa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam;

Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan kuasanya dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Kuasanya;

Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan kuasanya dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat maupun kuasanya;

Selanjutnya, saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada apa yang sebenarnya;

Kemudian, setelah disumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Perangkat Desa Guru Agung I sebagai Kasi Pelayanan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, tahun 2021 sudah diberhentikan sedangkan Penggugat sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab diberhentikannya sebagai Perangkat Desa Guru Agung I;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran dari kepala desa selama menjabat sebagai perangkat desa;

Hal. 44 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan Penggugat menjabat sebagai Perangkat desa pada saat

- periode Kepala Desa dijabat oleh Pjs yaitu Handri Syofrianto, S.E., M.Si;
- Bahwa saksi menyatakan Perangkat desa dipanggil ke kediaman kepala desa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 kemudian Kepala Desa menyampaikan ucapan terima kasih kepada perangkat desa atas pengabdian selama ini di Desa Guru Agung I kemudian diberikan surat pemberhentian sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 28 April 2021, akan tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa saksi menyatakan Perangkat Desa menyampaikan permasalahan terhadap terbitnya objek sengketa ini ke Pengurus PPID (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten dan Kecamatan kemudian Pengurus PPDI kecamatan memerintahkan untuk meneruskan permasalahan ke PPDI Kabupaten dan PPDI Kabupaten menyarankan untuk melakukan banding administratif;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada pengumuman dari Tergugat kepada masyarakat untuk melakukan seleksi penerimaan Perangkat Desa Guru Agung I yang baru;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini ;

*Hal. 45 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa tanggal 20 April 2021** (Vide bukti P-1=T.4);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya bulan September 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada bulan September 2021 yang pada pokoknya **Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat** berupa;

1. **Upaya Administrasi;**
2. **Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);**

Hal. 46 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan eksepsi yang diajukan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## **Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara**

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan

*Hal. 47 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Guru Agung I yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Desa Desa Guru Agung I serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Hal. 48 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat melalui surat Hal: Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian tanggal 28 April 2021 (*Vide* bukti P-2) yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian

*Hal. 49 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kabupaten Kaur dengan Surat Nomor : 01/LOES-A/VI/2021 Perihal: Permohonan Banding tanggal 12 Juni 2021 atas nama RAHMA HIDAYANAH (*Vide* bukti P-4) yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/620/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 8 Juli 2021 (*Vide* bukti P-5) hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 19 Juli 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2021, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan dan banding administratif seperti disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

### Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak

*Hal. 50 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diterima atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan halaman 3, dimana Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 23 April 2021, kemudian Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat melalui surat Hal: Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian tanggal 28 April 2021 (*Vide* bukti P-2) yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kabupaten Kaur dengan Surat Nomor : 01/LOES-A/VI/2021 Perihal: Permohonan Banding tanggal 12 Juni 2021 atas nama RAHMA HIDAYANAH (*Vide* bukti P-4) yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/620/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 8 Juli 2021 (*Vide* bukti P-5) hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 19 Juli 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2021, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 51 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi;

## **Kepentingan Penggugat**

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak

Hal. 52 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 3738);

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Perangkat Desa, tidak menerima gaji dan berpengaruh kepada mata pencarian Penggugat dan tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai Perangkat Desa (*Vide* Gugatan IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan halaman 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa yaitu **Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa tanggal 20 April 2021** (*Vide* bukti P-1=T.4), dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat berupa **Upaya Administrasi dan Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)**, dengan pertimbangan sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada bulan September 2021 yang didalamnya menyatakan eksepsi terkait Upaya Administrasi dan terhadap Upaya Administratif **telah dipertimbangkan didalam formalitas**

*Hal. 53 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**gugatan**, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan Upaya Administrasi, sehingga terhadap eksepsi Upaya Administrasi tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan penggugat kabur atau tidak, maka sebagai dasar pengujiannya Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa gugatan harus memuat : a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya*; b. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat*; c. *dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, dalam Gugatan Penggugat tersebut telah termuat subjek yang menjadi pihak dalam sengketa *a quo* yaitu RAHMA HIDAYANAH melawan Kepala Desa Guru Agung I (*vide* Gugatan hal. 1), yang mana masing-masing pihak telah diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus (*vide* surat kuasa khusus masing-masing pihak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dan dalam gugatannya, Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan gugatan yang mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

Hal. 54 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, serta melanggar Asas-Asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum, oleh karenanya Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat tidak kabur sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

*Hal. 55 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 141-03 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2018 tanggal 07 September 2018 (*Vide* bukti P-8), Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 01 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 (*Vide* bukti P-9), dan Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 (*Vide* bukti P-10);
2. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Desa Guru Agung I berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat**

Hal. 56 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Desa Tahun Anggaran 2021 Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa tanggal 20 April 2021 (Vide bukti P-1=T.4);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

## 1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa;

*Pasal 26*

(2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*

*b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), diatur berupa;

*Pasal 5*

*Hal. 57 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Menimbang, bahwa diatur pada pokoknya bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa tanggal 20 April 2021** (Vide bukti P-1=T.4), diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa di Desa Guru Agung I adalah Kepala Desa Desa Guru Agung I atas nama Sarwan Sono yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-390 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara tanggal 05 April 2021 (Vide bukti T.1);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Guru Agung I atas nama RAHMA HIDAYANAH berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Kepala Desa Guru Agung I beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

Hal. 58 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI**

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya (Bagian V. Posita Gugatan, halaman 5) mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 poin (a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 6 ayat (2) huruf (b), Pasal 6 ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta. Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya halaman 5, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa tidak melalui proses seleksi penyaringan dan penjaringan dan rekomendasi dari Camat Kecamatan Kaur Utara, dimana proses penerbitan dari Objek

*Hal. 59 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat serta bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa tanggal 20 April 2021** (Vide bukti P-1=T.4);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kronologis penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang pemberhentian perangkat desa telah diatur dan ditentukan didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 53, yang menyatakan:

## Pasal 53

- (1) *Perangkat desa berhenti karena:*
- a. meninggal dunia;*
  - b. permintaan sendiri; atau*
  - c. diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b. berhalangan tetap;*
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Hal. 60 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa;

## Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan

Hal. 61 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang prosedur pemberhentian Perangkat Desa berupa;

## Pasal 12

(1)

Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e harus dibuktikan dalam sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa yang dilakukan di tingkat kecamatan.

(4) pemberhentian perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:

Hal. 62 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat mengenai usulan pemberhentian dengan dilampiri bukti administrasi;
- b. Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa; dengan memperhatikan hasil sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa bagi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e;
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
- d. Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pemberhentian perangkat Desa ke Bupati untuk mendapatkan surat keterangan pencabutan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD);

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 141-03 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2018 tanggal 07 September 2018 (Vide bukti P-8), Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 01 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 (Vide bukti P-9), dan Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 (Vide bukti P-10) dan Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Desa Guru Agung I berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Kepala Desa Guru Agung I**

Hal. 63 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor: 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun**

**Anggaran 2021 Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai**

**Sekretaris Desa tanggal 20 April 2021 (Vide bukti P-1=T.4);**

Menimbang, bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 141-03 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2018 tanggal 07 September 2018 (Vide bukti P-8), Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 01 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 (Vide bukti P-9), dan Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 (Vide bukti P-10) yang menjadi dasar pengangkatan Penggugat selaku Sekretaris Desa Desa Guru Agung I tidak didasarkan bukti pendukung adanya proses penyaringan dan penjaringan sebagai perangkat desa di Desa Guru Agung I sebagaimana yang diatur didalam Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 141-03 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2018 tanggal 07 September 2018 (Vide bukti P-8), Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 01 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 (Vide bukti P-9), dan Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Hal. 64 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 (Vide bukti P-10), yang seharusnya dalam penerimaan Perangkat Desa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam berbagai aturan yang muncul setelah adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Kepala Desa Guru Agung I Nomor: 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Lampiran Nomor urut 1 atas nama RAHMA HIDAYAH sebagai Sekretaris Desa tanggal 20 April 2021** (Vide bukti P-1=T.4) terbukti telah sesuai dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedural maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Gugatan *a quo* telah ditolak, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat *a quo* tidak perlu dipertimbangkan sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian

Hal. 65 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 66 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

**DALAM PENUNDAAN**

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.262.000, (*dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022** yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Februari 2022** oleh kami **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RAHMA KURNIA FITRI, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.**

**DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

*Hal. 67 dari 68 Hal. Putusan No. 40/G/2021/PTUN.BKL*



TTD

**BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara : \_\_\_\_\_

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,
2. PNBP Lainnya : Rp. 30.000,
3. Panggilan : Rp. 82.000,
4. Redaksi : Rp. 10.000,
5. Materai : Rp. 10.000,
6. ATK Perkara : Rp. 100.000.

Jumlah : Rp. 262.000,

*(Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)*